



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik ;
  - b. bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Magelang perlu disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan yang efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2011 ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3455) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) ;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2) ;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi, Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5) ;

18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 8) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan kabupaten/Kota ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2011 ;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 162 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2011.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.

5. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Uraian Kebijakan Pengawasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 Mei 2011

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

INSPEKTORAT

PEJABAT	PARAF
Inspektur	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Irban Wil	-
Kasubba	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 26 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG  
ASISTEN HUMAS, PERLENGKAPAN DAN UMUM,

AZIS AGUS SURYANTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1 ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1 Ka Bag	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR :  
TANGGAL :  
\_\_\_\_\_

**PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2011**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan otonomi daerah melalui ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut di atas, telah memberikan pemikiran ke depan, bahwa daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang dalam peraturan perundangan – undangan ditentukan menjadi urusan pemerintah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter / fiskal nasional dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan tugas pembantuan.

Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2011 sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2011.

## **B. Tujuan**

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2011 ;
2. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan agar senantiasa berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

## **II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN**

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2011 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah guna membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif, dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2011 dinyatakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan pengawasan masyarakat ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat.

### **III. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu :

- A. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :
  - 1. Kebijakan Daerah ;
  - 2. Kelembagaan ;
  - 3. Kepegawaian Daerah ;
  - 4. Keuangan Daerah ;
  - 5. Barang Daerah.
- B. Pengawasan urusan pemerintahan yang terdiri dari :
  - 1. Urusan wajib ;
  - 2. Urusan pilihan.

### **IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN**

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

#### **A. Kegiatan Utama**

##### **1. Pemeriksaan**

- a. Pemeriksaan reguler di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
- b. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
- c. Pemeriksaan Khusus/Strategis ;
- d. Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat.

##### **2. Monitoring dan Evaluasi**

- a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana ;
- b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **3. Sosialisasi dan Asistensi**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja, perlu melaksanakan sosialisasi penyuluhan, pembinaan, serta asistensi (bimbingan teknis) kepada para petugas penyusun laporan keuangan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan petugas pengawasan/auditor untuk perumusan format serta substansi materi laporan keuangan agar dapat melakukan review laporan keuangan dimaksud.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan mengundang nara sumber dari kalangan profesional dan atau perguruan tinggi.

### **4. Review Laporan Keuangan Daerah**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

### **5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam pemantauan terhadap temuan-temuan yang ada di Kota Magelang, yaitu : temuan pemeriksaan Inspektorat Kota Magelang, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP dan BPK serta temuan lainnya.

Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu BPK juga memantau tindak lanjut dari temuan pemeriksaannya secara periodik oleh Tim.

## **6. Penelitian Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P)**

Dalam kegiatan ini setiap PNS di jajaran Departemen Dalam Negeri dari Golongan III/a ke atas wajib menyampaikan LP2P yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.

## **7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004**

Setiap kabupaten/kota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 setiap semester kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara maupun kepada Gubernur.

## **8. Sosialisasi Data Tindak lanjut Hasil Pengawasan**

Dalam rangka mensosialisasikan dan mengkomunikasikan data tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan maka setiap 1 (satu) tahun sekali diselenggarakan Rapat Dinas Gelar Pengawasan.

## **B. Kegiatan Penunjang**

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri atas :

### **1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan**

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Pengawasan, yang dimiliki perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi pendidikan dan pelatihan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural, pendidikan dan pelatihan pengawasan. Untuk itu perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan yang anggarannya berada pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang.

### **2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan**

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi pengawasan yang terpadu, maka harus menyusun *database* pengawasan yang terus dimutakhirkan dan dikembangkan. *Database* pengawasan tersebut antara lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut pengawasan dan berbagai data sumber daya manusia (SDM) pengawasan.

### **3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor**

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai, diantaranya meliputi sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan kantor.

### **4. Kegiatan penunjang Lainnya**

Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), penyusunan daftar obyek pengawasan, penyusunan daftar temuan, tindak lanjut hasil pengawasan dan penyusunan prosedur tata kerja pengawasan.

## **V. KOORDINASI PENGAWASAN**

Untuk mewujudkan efektivitas koordinasi pengawasan intern pemerintah di Kota Magelang diperlukan koordinasi antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup :

### **A. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)**

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan. Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah, Rakorwas antar APIP Pusat, Rakorwas Regional, Rakorwas Daerah.

Tujuan Rakorwas adalah untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan. Rakorwas diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, BPKP, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Magelang.

### **B. Koordinasi Pelaporan**

Koordinasi pelaporan dilakukan melalui pengiriman laporan dari satu APIP kepada APIP lainnya yang memerlukan.

Koordinasi pelaporan juga perlu dilakukan antara APIP dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam bentuk pengiriman laporan hasil pemeriksaan APIP kepada BPK RI, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

### C. Frekuensi Pemeriksaan di Kota Magelang

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan oleh APIP yang berbeda dengan tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pemeriksaan terdahulu pada obyek pemeriksaan yang bersangkutan, dengan sasaran dan tujuan pemeriksaan yang sama atau berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan kasus dan khusus yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan APIP di Provinsi Jawa Tengah dan Walikota Magelang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Magelang.

Sedangkan pemeriksaan oleh BPK tidak dapat dimasukkan ke dalam PKPT tersebut karena diatur langsung oleh amanat Undang – Undang Dasar dan Undang – Undang.

## VI. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang merupakan upaya untuk mensinergikan Inspektorat Kota Magelang dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah.

Untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama antar APIP, sehingga program-program yang disusun oleh masing-masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan Inspektorat Kota Magelang dapat menjadikan Kebijakan Pengawasan ini sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Magelang Tahun 2010.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

INSPEKTORAT

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1 ASISTEN	
1 Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
Inspektur	
Sekretaris	
Irbas Wil	-
Kasubbag	